



KR-Antara/Maulana Surya

PEMERIKSAAN GIGI: Dokter memakai alat pelindung diri (APD) Level III saat memeriksa kesehatan gigi pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Soelastris, Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6). Rumah sakit menerapkan pedoman pelayanan selama pandemi Covid-19 bagi dokter gigi, petugas medis, dan karyawan yang bertugas, serta skrining pasien guna mencegah penyebaran Covid-19.

STOK BERAS CAPAI 7,49 TON

Mentan Apresiasi Produksi Padi MT I

JAKARTA (KR) - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi kerja keras para petani di seluruh Indonesia dan berdasarkan data yang ada stok beras akhir bulan Juni mencapai 7,49 juta ton. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Jakarta, Kamis (11/6).

"Angka tersebut sudah termasuk dalam hitungan stok hingga akhir Desember 2020 yang mencapai 6,1 juta ton," ujar Mentan.

Untuk informasi, rapat koordinasi ini diikuti Provinsi DI Yogyakarta, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Lebih lanjut, Mentan menyatakan, apresiasi ini perlu diberikan karena mereka sukses melakukan cocok tanam Musim Tanam (MT) I dengan peningkatan produksi yang luar biasa.

"Di saat pandemi Covid-19 melemahkan semua sendi-sendi perekonomian, sektor pertanian menjadi penyelamat dengan hasil panen yang luar biasa dan mampu memberi makan yang cukup bagi masyarakat," ujar Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai informasi, pada MT I luas tanam OKMAR mencapai 6,07 juta Ha dengan luas panen dari Januari-Juni sekitar 5,83 juta Ha. Dari luasan tersebut para petani mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 29,02 juta ton dan menghasilkan beras murni sebanyak 16,65 juta ton atau senilai Rp 168 triliun. (Sim)-d

Sultan

Kulonprogo. Untuk itu, pihaknya mengalakkan semangat Bela Beli Kulonprogo artinya masyarakat membeli atau bertransaksi di Kulonprogo. Terlebih Kulonprogo masih tergolong aman daripada kabupaten lainnya di DIY perihal kasus virus Korona. "Jika membeli dan bertransaksi di Kulonprogo dengan semangat Bela Beli Kulonprogo maka kesehatan lebih terjamin. Kedua tingkat perekonomian arus bawah juga akan berputar," tandasnya.

Politisi muda PDI Perjuangan Kulonprogo yang akhirnya menduduki kursi Wabup Kulonprogo setelah sekitar 7 bulan kosong tersebut menegaskan dirinya yang dekat dengan generasi milenial untuk bekerja dan berpikir lebih keras dan merubah mindset terutama di sektor pertanian. Mengingat sektor pertanian di era saat ini belum banyak digeluti para milenial sehingga dirinya mengajak agar milenial berusaha keras ikut menyatukan teknologi dengan pertanian.

"Kami ingin generasi milenial Kulonprogo tidak gengsi dengan memajukan teknologi di

Sambungan hal 1 sektor pertanian," imbuh Fajar.

Sedangkan Bupati Kulonprogo Sutedjo menyatakan, tugas baru yang langsung menunggu Fajar adalah memimpin penanggulangan Covid-19 di Kulonprogo. Karena secara struktural fungsional, memimpin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, selain itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Narkotika Kabupaten Kulonprogo. Adapun untuk rencana pemberlakuan kenormalan baru di Kulonprogo akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Dalam penanganan Covid-19 yang paling berat dan menjadi tantangan bersama adalah mengedukasi masyarakat. Karena sampai saat ini persoalan itu masih jadi PR bersama. Kita kadang lihat di ruang terbuka masih ada masyarakat yang tidak memakai masker. Saya minta bantuan media untuk mendorong masyarakat pakai masker dengan kesadaran sendiri. Kalau mau normal baru, ya kesadarannya, tidak perlu dioyak-oyak," tegasnya. (Ria/ra)-f

Masuk

hanya dilakukan secara patroli melainkan juga standy. Di ujung utara atau pintu masuk Malioboro sudah ada petugas yang memeriksa kelengkapan pengunjung. Pengendara yang tidak memakai masker, langsung dihalaui menuju Jalan Pasar Kembang. Sedangkan bagi pejalan kaki yang sudah di Malioboro dan tidak memiliki masker, akan dibagikan masker gratis. Tetapi jika tidak dipakai, langsung dihalaui keluar.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku pada Rabu (10/6) malam dirinya memimpin inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Malioboro. "Ada beberapa pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker. Saat hendak masuk Malioboro, kita halau keluar," tegasnya.

Pemakaian masker menjadi salah satu instrumen wajib bagi siapapun yang ada di kawasan Malioboro. Di samping itu, menjaga jarak serta menghindari kerumunan juga tidak kalah penting untuk ditegakkan. Petugas keamanan yang terdiri dari Jogoboro maupun Sat Pol PP tidak segan membubarkan setiap kerumunan masyarakat.

Namun demikian, Heroe mengapresiasi ke-

Sambungan hal 1 sadaran warga yang ada di kawasan Malioboro. Para pedagang yang sudah membuka usahanya dinilai tertib dalam menggunakan masker serta menyediakan tempat cuci tangan. "Tindakan tegas bagi setiap pelanggaran protokol akan kami atur melalui perwal yang sedang disiapkan. Nanti tidak hanya berlaku di Malioboro, tapi semua tempat publik untuk menuju tahapan *new normal*," imbuhnya.

Di samping itu, guna memudahkan penelusuran bagi setiap pengunjung yang masuk kawasan wisata, termasuk Malioboro, akan diberlakukan QR Code. Tahap awal sudah dilakukan bagi pengunjung kuliner kawasan Alun-alun Utara. Pengunjung cukup memindai kode unik, kemudian mengisi data diri yang ada di dalamnya. "Itu nanti akan memudahkan *tracing* manakala ada temuan kasus positif. Jadi kita sudah tahu data siapa saja pengunjung pada saat itu," tandasnya.

Oleh karena itu, pengunjung yang memiliki smartphone diimbau mengunduh aplikasi scan QR Code. Bagi yang tidak memiliki pun akan dibantu menggunakan perangkat milik petugas. Dalam kode unik tersebut, pengunjung cukup mengisi nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. (Dhi)-f

Utamakan

Dikatakan, kegiatan simulasi ini untuk mempersiapkan penerapan standar protokol kesehatan dalam menerima kunjungan wisatawan nanti. "Rencana simulasi ini telah mendapatkan izin dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dari masing-masing Pemerintah Daerah," katanya.

Menurut Edy, penerapan standar normal baru pariwisata di destinasi TWC untuk seluruh wisatawan yang masuk harus mengikuti protokol kesehatan, antara lain, menggunakan masker, melakukan cuci tangan, melewati *chamber* disinfektan dan pengecekan suhu tubuh.

Kemudian melakukan *visitor management* dengan menerapkan *physical distancing*, meminimalkan pembayaran dengan *cash-*

Sambungan hal 1 *cashless*, menyediakan *hand washing* di beberapa titik, pemasangan tanda dan papan informasi protokol Covid-19 serta mempersiapkan klinik kesehatan untuk wisatawan yang sakit. "Setelah melakukan simulasi penerapan standar *new normal* tersebut, kami akan melakukan evaluasi dan hasilnya akan kami laporkan ke Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata serta ke Pemerintah Daerah terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa destinasi kami sudah siap dalam menerima wisatawan di masa pandemi ini," katanya.

la mengatakan, PT TWC BPRB sebagai pengelola destinasi 'Super Prioritas' harus menjadi *role model* penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi destinasi-destinasi lain di Indonesia. (Ant/lsw)-d

PEMERINTAH PERSIAPKAN Afirmasi Lembaga Pendidikan Keagamaan

JAKARTA (KR) - Tatanan kenormalan baru (*new normal*) telah diberlakukan. Berbagai sektor kehidupan mulai dibuka kembali, mulai dari sektor ekonomi, industri, sampai pemerintahan. Untuk sektor pendidikan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai afirmasi (penguatan). Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk afirmasi pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren.

Supaya implementasinya lebih merata untuk seluruh lembaga pendidikan keagamaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pimpinan lembaga pendidikan keagamaan untuk mengirimkan data-data terkait jumlah siswa, guru, regulasi dan keperluan infrastruktur penunjang

seperti layanan kebersihan dan internet untuk proses belajar mengajar di tatanan normal baru.

"Kebijakan afirmasi ini diberlakukan sama sebagaimana yang telah dibahas dalam rapat sebelumnya, kuncinya yaitu berada pada keakuratan data. Koordinasikan data melalui satu pintu yaitu Kementerian Agama untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemensos, Kemendes, Kemenkominfo dan Kemenpupera," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait kebijakan afirmasi pendidikan keagamaan, Kamis (11/6).

Rapat tersebut dihadiri Menag Fachrul Razi, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari Batubara, Mendes PD/TT Abdul Halim Iskandar, Menkominfo Johnny G Plate, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, perwakilan Kement-

keu, Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian PUPR, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden serta ketua umum organisasi lintas agama yakni Ketum PGI, Ketum KWI, Ketum PHDI, Ketum Walubi, Ketum Permabudhi, Ketum Matakin.

Kemudian, lanjut Menko PMK, afirmasi lembaga pendidikan keagamaan berkaitan pula dengan pemenuhan kriteria kesehatan. Pimpinan lembaga pendidikan, menurutnya, perlu berkomitmen untuk memenuhi protokol kesehatan serta bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan gugus tugas di wilayah setempat.

Pembukaan lembaga pendidikan keagamaan khususnya yang berasrama di tengah pandemi Covid-19 memang belum pasti. Namun, ada opsi untuk membuka lembaga pendidikan keagamaan menyesuaikan status aman Covid-19 di wilayah asal lembaga pendidikan. (Ati)-d

SIRKULASI UDARA KABIN AMAN DARI VIRUS

Kapasitas Penumpang Pesawat Ditingkatkan

JAKARTA (KR) - Kapasitas penumpang pesawat udara akan ditingkatkan secara bertahap dengan pengaturan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kebijakan ini mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi penerbangan internasional ICAO, EASA, CASA, CAA serta otoritas penerbangan internasional lainnya dalam masa pandemi Covid-19.

Penerapan penambahan kapasitas penumpang pesawat udara telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara No 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19.

"Kami memastikan seluruh ketentuan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh organisasi penerbangan internasional, ICAO, yang juga diterapkan oleh banyak negara. Melalui

Surat Edaran Dirjen 13/2020 sangatlah jelas mengatur penerapan standar operasional prosedur, baik di bandara maupun pesawat udara," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto di Jakarta, Kamis (11/6).

Novie Riyanto menjelaskan, sistem filtrasi udara dan teknologi sirkulasi udara di pesawat sangat aman. Kondisi ini dapat meminimalisasi penularan Covid-19, dengan menggunakan teknologi filtrasi HEPA atau *High Efficiency Particulate Air* di dalam pesawat udara.

"Pada pesawat udara, sistem filtrasi dan sirkulasi udara di kabin dirancang untuk meminimalisasi penyebaran bakteri maupun virus hingga ukuran yang sangat kecil. Meski begitu, kami tetap akan mempelajari dan akan melakukan pembaruan ketentuan kapasitas secara bertahap, juga sesuai dengan ketentuan aturan internasional," tambah Novie.

Menurut Novie, lebih dari 85 persen

pesawat penumpang di Indonesia merupakan pesawat yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara HEPA. Dengan adanya pembatasan interaksi dan pembatas antarbaris, hal ini dipandang dapat mengurangi risiko penularan Covid-19 saat berada di dalam pesawat.

Pada pesawat pabrikan Airbus, proses sirkulasi udara di dalam kabin diperbarui setiap 2-3 menit menggunakan HEPA. Sedangkan pesawat pabrikan Boeing, sirkulasi udara menggunakan HEPA menghasilkan 50 persen udara segar luar yang difiltrasi dalam kabin.

Sementara, pada pesawat jenis ATR, meskipun tidak menggunakan HEPA, sistem sirkulasi udaranya tetap terjamin dengan mekanisme dua buah *Environment Control System (ECS) Packs Operative*, dimana udara di kabin pesawat diperbarui setiap 5-7 menit. (Imd)-a

Masyarakat

kehatan. Selama hal itu tidak bisa dilakukan, seandainya DIY mau mengajukan *new normal* ke pemerintah pusat pasti ditolak," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Kamis (11/6).

Sultan mengungkapkan, apabila para pengunjung di Kawasan Malioboro tidak mau disiplin dan menaati protokol kesehatan, dirinya sempat mengeluarkan ancaman untuk melakukan penutupan di Malioboro. Apabila hal itu sampai terjadi pasti banyak anggota masyarakat yang akan terkena imbasnya. Namun tindakan itu, mau tidak mau harus di-

lakukan, untuk mengantisipasi adanya klaster atau gelombang kedua Covid-19.

"Saya sempat punya kesepakatan dengan Pak Walikota dan Wakil Wali Kota Yogya kalau ada pengunjung masuk Malioboro tidak memakai masker diminta pulang. Kita lebih baik keras daripada supaya Covid-19 atau gelombang kedua tidak muncul di Yogya," ungkap Sultan.

Sedangkan Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengapresiasi langkah pembatasan akses masuk Malioboro yang dilakukan Pemkot Yogyakarta mulai Kamis (11/6) ini. Upaya pembatasan akses masuk ke kawasan Malioboro baik bagi pe-

Sambungan hal 1 ngunjung, wisatawan maupun pengendara yang melintas ini bisa diterapkan di titik-titik keramaian yang ada di kabupaten/kota di DIY kedepannya.

Sementara itu, kasus positif Covid-19 di DIY kembali bertambah, yakni dua kasus. Sehingga total kasus positif menjadi 252 kasus di DIY. Kasus sembuh dari virus Korona mengalami penambahan hanya satu kasus sembuh.

"Hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif terdapat tambahan 2 kasus positif, sehingga total kasus positif Covid-19 di DIY menjadi 252 kasus," ujar Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih. (Ira/Ria)-f

Tagihan

pembengkakan tagihan listrik lantaran tidak ada penjelasan memadai dari PLN sebelumnya. Setelah banyak pelanggan yang protes terkait pembengkakan tagihan listrik itu, PLN baru memberikan penjelasan kepada masyarakat, dengan membentuk Satgas Pengaduan.

PLN mengatakan tidak menaikkan tarif listrik, lantaran penetapan tarif listrik merupakan kewenangan Pemerintah, bukan keputusan PLN. Sedangkan, Pemerintah sudah memutuskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik selama 2020, sehingga kenaikan tagihan listrik itu bukan karena adanya kenaikan tarif listrik. Bukan pula adanya subsidi silang untuk menutup beban biaya gratis dan diskon bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA, lantaran biaya tersebut ditanggung pemerintah, yang dialokasikan dari APBN 2020.

Paling tidak ada 2 penyebab utama pembengkakan tagihan listrik itu. Pertama, adanya peningkatan konsumsi listrik selama menjalankan *work from home* (WFH) alias kerja di rumah. Selama WFH, intensitas pemakaian listrik untuk penangan, AC, komputer, pompa air dan sebagainya pastilah meningkat pesat. Peningkatan intensitas pemakaian listrik itu lah yang memberikan kontribusi terhadap pembengkakan tagihan listrik sejak Maret hingga Mei 2020.

Kedua, adanya perubahan pola pencatatan meteran listrik yang menjadi dasar penetapan tagihan listrik. Pada masa pandemi Covid-19, PLN memutuskan tidak menerjunkan petugas pencatat meteran listrik ke rumah-rumah. Baru pada Mei 2020, PLN kembali menerjunkan petugas pencatat meteran ke rumah pelanggan. Untuk menetapkan tagihan listrik selama sebulan, PLN menghitung dari rata-rata tagihan listrik selama 3 bulan terakhir.

Tagihan riil bisa lebih kecil dari pada rata-rata tagihan, yang menimbulkan lebih bayar. Namun, bisa juga tagihan riil lebih besar, yang menimbulkan kurang bayar. Kurang-dan-lebih bayar itulah yang dikurangkan dan ditambahkan pada tagihan listrik bulan Mei 2020, sehingga hasilnya ada tagihan listrik yang menurun dan ada pula yang membengkak.

PLN telah memberikan keterangan bagi pelanggan yang tagihannya membengkak dengan cara mengangsur (*installment*) selama 3 bulan ke depan. Penetapan tagihan listrik dengan penghitungan rata-rata tagihan selama 3 bulan dan *installment* sesungguhnya sudah sesuai dengan *international standard*, yang diterapkan di berbagai negara. Hanya masalahnya, PLN tidak memberikan penjelasan memadai kepada pelanggan. Sehingga masyarakat terkejut-kaget manakala terjadi pem-

Sambungan hal 1 bagi pelanggan, seperti yang telah diterapkan PT Kereta Api Indonesia. Dengan *service excellent*, termasuk dalam komunikasi publik memadai, masyarakat tidak akan terkejut-kaget pada saat tagihan listrik membengkak.

(Penulis adalah Dosen Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, pengurus ISEI Yogyakarta)-d

Dompet

448 NN	200,000.00
JUMLAH	Rp 700,000.00
JUMLAH	Rp 1,000,000.00
s/d 10 Juni 2020	Rp 275,987,026.00
s/d 11 Juni 2020	Rp 276,987,026.00
(Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah)	



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Cuaca	Malam	Dini Hari	Suhu	Kelembaban
Bantul					22-32	60-90
Sleman					22-31	65-90
Wates					22-32	60-90
Wonosari					22-32	60-90
Yogyakarta					22-31	65-95